



Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP Negeri di Kota Surabaya

¹ Dwi Anggraini, ² M. Kendry Widiyanto, ³ Anggraeny Puspaningtyas,
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
^{1,2,3} Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,

¹Email : dwianggraini.da9@gmail.com; ²Email : kenronggo@untag-sby.ac.id;

³Email : anggraenypuspa@untag-sby.ac.id.

Korespondensi penulis : dwianggraini.da9@gmail.com

Abstract. *This research was conducted with the aim of researching and evaluating the New Student Admission Zoning System Policy (PPDB) at the State Middle School level in the City of Surabaya. This research analysis was carried out using a qualitative descriptive approach. The research results show that the zoning system implemented is considered effective in achieving its main goal, namely equal distribution of quality education. However, other parents are disappointed because their children cannot attend public junior high schools because the distance between home and school is too far. So that the zoning system policy for Admission of New Students (PPDB) in State Middle Schools in Surabaya City in the future can be more optimal, the government will pay more attention to the problems faced by students during the registration process. The government must also see directly whether socialization is carried out immediately so that the implementation of the PPDB zoning system can be carried out optimally.*

Keywords: *public policy, public policy evaluation, PPDB zoning system*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti dan mengevaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat SMP Negeri di Kota Surabaya. Analisis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem zonasi yang diterapkan dinilai efektif dalam mencapai tujuan utamanya, yakni pemerataan pendidikan berkualitas. Namun, sebagaimana orang tua lainnya kecewa karena anaknya tidak bisa bersekolah di SMP Negeri karena jarak rumah dan sekolah yang terlalu jauh. Agar kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri di Kota Surabaya kedepannya bisa lebih optimal, maka pemerintah akan lebih mencermati permasalahan yang dihadapi siswa pada saat proses pendaftaran. Pemerintah juga harus melihat langsung apakah sosialisasi dilakukan secara merta adgar penerapan sistem zonasi PPDB bisa terlaksana secara maksimal.

Kata Kunci : kebijakan publik, evaluasi kebijakan public, PPDB sistem zonasi

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan upaya mengembangkan kepribadian manusia baik lahir maupun batin. Berdasarkan teori pendidikan yang dijelaskan oleh Aristoteles, dapat dipahami bahwa pendidikan adalah langkah awal untuk mempersiapkan peserta didik yang berkualitas melalui proses belajar dan mengembangkan kematangan jasmani dan mental.

Mewujudkan hak atas pendidikan warga negara Indonesia. Untuk itu perlu adanya pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia agar setiap orang dapat memperoleh manfaat dari pendidikan yang layak dan berkualitas. Dalam sistem pendidikan Indonesia masih belum tercapai pemerataan pendidikan.

Pada tahun 2017 ke bawah, sistem PPDB sebelumnya menggunakan hasil Ujian Nasional sebagai standar siswa baru untuk dapat masuk di sekolah yang diinginkan, sehingga adanya istilah sekolah favorit. Fenomena ini disebabkan karena kebijakan penerimaan

Received: Mei 30, 2024; Accepted: Juni 19, 2024; Published: Agustus 30, 2024;

* Dwi Anggraini, dwianggraini.da9@gmail.com ---

peserta baru hanya berdasarkan nilai Ebtanas Nasional (NEM) di tingkat sekolah negeri. Hasilnya, siswa berprestasi akan berbondong-bondong ke sekolah pilihannya. Fenomena sekolah yang favorit semakin memperparah ketimpangan keberhasilan di kalangan siswa. Sekolah-sekolah berkualitas meningkat, sementara sekolah-sekolah miskin cenderung menurun.

Fenomena di atas berdampak pada pemerataan layanan pendidikan. Meskipun keadaan sosial siswa berbeda, mereka tetap ingin memperoleh manfaat dari kedudukan dan kesempatan yang sama dalam pendidikan. Mempunyai pendidikan yang berkeadilan berarti mempunyai pendidikan yang merata. Setiap orang berhak memperoleh manfaatnya tanpa diskriminasi berdasarkan status sosialnya. Pemerintah berupaya menghilangkan ketimpangan yang ada di masyarakat dalam hal sekolah favorit dan tidak favorit. Inilah permasalahan utama ketimpangan pendidikan di Indonesia.

Kebijakan sistem zonasi sekolah ini, sebagai mana tertuang dalam Permendikbud No 17 Tahun 2017. Pada proses sistem zonasi berlaku pada PPDB SD, SMP, dan SMA/SMK. Untuk tingkat SD dan SMP kewenangan diatur oleh pemerintah kabupaten/kota, sedangkan SMA/SMK menjadi kewenangan Provinsi. Karena kewenangan terpisah, aturan radius zonasi yang diterapkan pun bisa berbeda-beda.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait PPDB, Pemerintah Pusat memberikan fleksibilitas daerah dalam menentukan alokasi untuk siswa masuk ke Sekolah melalui jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orangtua/wali, atau jalur lainnya (dapat berupa jalur prestasi). Persentasenya pun berubah menjadi sebagai berikut: (kemdikbud.go.id)

Tabel 1. 1 Perubahan Peraturan Kebijakan Sistem Zonasi

<u>Permendikbud PPDB No. 17 Tahun 2017</u>	<u>Permendikbud PPDB Terbaru No. 1 Tahun 2021</u>
a. <u>Jalur zonasi minimal 90%</u>	a. <u>Jalur zonasi minimal 50%</u>
b. <u>Jalur prestasi maksimal 5%</u>	b. <u>Jalur afirmasi minimal 15%</u>
c. <u>Jalur perpindahan orangtua/wali maksimal 5%</u>	c. <u>Jalur perpindahan orangtua/wali maksimal 5%</u>
	d. <u>Jika ada kouta, jalur prestasi dapat dibuka, bisa berdasarkan UN ataupun prestasi akademik dan non-akademik lainnya. Jalur ini dengan demikian maksimal 30%</u>

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Menafsirkan Permendikbud No 1 Tahun 2021 berisi sistem zonasi adalah PPDB, dimana sekolah menerima calon siswa baru yang berada di atau dekat sekolah daerah mereka atau tempat tinggal. Tempat tinggal calon murid baru dicatat dalam KK/surat keterangan

kependudukan RT dan RW yang disahkan oleh kepala desa atau paling lambat oleh kepala desa satu tahun sebelum penerapan kebijakan yang berlaku.

Dengan keluarnya Permendikbud ini, setiap daerah di Indonesia mempunyai kewenangan menetapkan peraturan daerah yang mengatur kebijakan sistem zonasi sekolah di daerahnya masing-masing. Kota Surabaya menggunakan Perwali Surabaya No. 21 Tahun 2024 tentang PPDB TK, SD Negeri, dan SMP Negeri. Pada SMP Negeri yang menjelaskan bahwa menerapkan dua sistem zonasi, yaitu sistem zonasi 1 dan zonasi 2. Sistem zonasi satu untuk calon murid baru yang tinggal satu kelurahan dengan sekolah. Sistem zonasi dua untuk calon murid baru yang tinggal dalam satu kecamatan dengan sekolah.

Dalam Perwali Surabaya No. 21 Tahun 2024 yang memuat peraturan terkait proses PPDB tingkat sekolah menengah berdasarkan jarak rumah ke sekolah terdekat dalam lingkup perencanaan tertentu membuat wali murid siswa kebingungan. Pada peraturan baru tersebut tidak lagi menggunakan hasil UN untuk keterima sekolah SMPN. Adapun diklarifikasi hasil ujian nasional di masa depan tidak akan mempengaruhi kelayakan untuk masuk sekolah negeri. Dengan begitu, berdampak pada menurunnya minat belajar siswa untuk menghadapi ujian nasional. Hal ini berpengaruh pada kesiapan murid untuk keterima sekolah yang diinginkannya menjadi sangat tipis.

Selain itu, proses PPDB melalui sistem zonasi juga menimbulkan permasalahan baru. Pertama, siswa di Kota Surabaya tidak bisa lagi bersaing untuk masuk ke sekolah pilihannya kecuali melalui sistem zonasi. Kedua, rata-rata prestasi siswa menurun karena siswa berprestasi tersebar di berbagai daerah. Sekalipun siswa memperoleh nilai rata-rata yang rendah pada ujian nasional, sekolah tetap harus menerima siswa dengan nilai yang sangat rendah, di bawah standar.

Berdasarkan uraian sebelumnya, diketahui bahwa sistem zonasi penerimaan PPDB dapat meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, menghilangkan persepsi masyarakat terhadap sekolah pilihan dan kemudahan jarak tempu untuk mengenyam pendidikan. Namun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan yang bertentangan dengan tujuan kebijakan zonasi sekolah yang telah ditetapkan, seperti yang terjadi di kota Surabaya.

Maka dari itu, peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William Dunn yaitu evaluasi secara umum mengacu pada 6 variabel, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan yang dapat menentukan keberhasilan dari evaluasi kebijakan ini. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP Negeri di Kota Surabaya”**.

TEORI

Konsep Kebijakan Publik

Di setiap negara tentunya mempunyai kebijakan tersendiri. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah merupakan bentuk respon terhadap masyarakat. Dalam kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah, para pejabat pemerintah sebagai penyelenggara negara berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Memang kebijakan didasarkan pada pertimbangan rasional dalam proses pembangunan.

Kebijakan masyarakat dibagi menjadi dua jenis: kebijakan privat dan kebijakan publik. Kebijakan privasi mengacu pada kebijakan yang dibuat atau dikeluarkan oleh organisasi swasta sehingga tidak mengikat organisasi lain, misalnya kebijakan perusahaan. Sedangkan kebijakan publik lebih mengacu pada kebijakan yang dilaksanakan atau dikeluarkan oleh pemerintah suatu daerah dimana kebijakan tersebut mengikat masyarakat dan organisasi di daerah tersebut, misalnya pada bidang pendidikan..

Konsep Evaluasi Kebijakan Publik

Pengembangan kebijakan yang telah disetujui harus dilaksanakan. Selain itu, setiap kebijakan yang dilaksanakan harus dipantau dan dievaluasi. Evaluasi terhadap kebijakan ini diperlukan untuk mengetahui kebijakan tersebut telah dilakukan dengan baik atau masih terdapat kekurangan. Melalui evaluasi kebijakan, pencarian solusi juga akan lebih mudah jika ditemukan permasalahan pada saat proses implementasi kebijakan.

Evaluasi kebijakan yang disampaikan oleh William Dunn berpendapat bahwa evaluasi kebijakan tidak hanya sekedar mengumpulkan informasi tentang kebijakan apa yang bisa dan tidak bisa diprediksi, namun tujuan evaluasi adalah untuk menjelaskan proses di masa lalu, sekarang dan masa depan. Lebih jauh lagi, tujuan evaluasi kebijakan adalah untuk menentukan apakah suatu kebijakan atau program tertentu akan memiliki efektivitas tertinggi (atau terendah) bagi semua individu, kelompok, dan masyarakat jika diambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, diantara berbagai teori yang disebutkan di atas, teori William Dunn dipilih sebagai teori yang paling tepat untuk mengevaluasi kebijakan sistem zonasi PPDB tingkat SMPN di Kota Surabaya.

Dalam mengevaluasi suatu kebijakan, diperlukan beberapa kriteria untuk mengukur apakah kebijakan tersebut berhasil diterapkan atau tidak. William N. Dunn (2003) mengajukan beberapa kriteria untuk mengukur keberhasilan kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Konsep Kebijakan Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

PPDB adalah khusus pendaftaran mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, sampai SMA/SMK. PPDB merupakan catatan harian pembelajaran yang diselenggarakan setiap tahun ajaran baru. Sistem zonasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dipahami sebagai pembagian atau pemisahan suatu kawasan menjadi beberapa bagian, berdasarkan fungsi dan tujuan pengelolaan kawasan tersebut. Adanya kebijakan zonasi PPDB dapat menciptakan kualitas pemerataan pendidikan di Indonesia, sehingga dalam penerapan sistem ini pemerintah telah merencanakan kebijakan PPDB yang masuk TK, SMP, dan SMA/SMK diatur dalam Keputusan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB sistem zonasi. Menurut Mendikbud, tujuan sistem zonasi adalah PPDB bertujuan untuk memastikan pemerataan layanan pendidikan kepada siswa, menyediakan lingkungan belajar yang lebih dekat dengan rumah dan menghilangkan diskriminasi di sekolah.

METODE PENELITIAN

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu pemeriksaan dokumen berupa buku, literatur, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi kebijakan sistem zonasi PPDB pada SMP negeri di kota Surabaya.

Lokasi penelitian Dinas Pendidikan Kota Surabaya, SMPN 10 Surabaya, SMPN 12 Surabaya, SMPN 43 Surabaya dan SMPN 45 Surabaya, karena peneliti menemukan sistem zonasi PPDB pada SMP Negeri mulai mendapat perhatian. Pasca penerapan sistem zonasi, banyak keluhan dari beberapa orang tua siswa yang kita lihat bahwa sistem zonasi mengutamakan jarak rumah terdekat dengan sekolah tujuan dan mengabaikan hasil ujian nasional.

PEMBAHASAN

Menurut teori William Dunn, ada beberapa kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan sistem zonasi PPDB pada tingkat SMP Negeri di kota Surabaya. Berdasarkan teori evaluasi yang digunakan oleh William Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

1. Efektivitas

Efektivitas adalah pelaksanaan kebijakan dalam lingkup program atau kebijakan yang dilaksanakan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada hasil penelitian, penerapan kebijakan

Sistem Zonasi PPDB berjalan dengan baik, sejalan dengan Kebijakan Perwali Surabaya Nomor 21 Tahun 2024. Dapat dikatakan kebijakan ini efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utamanya adalah pemerataan pendidikan yang berkualitas. Namun, sebagian orang tua lainnya kecewa karena anaknya tidak bisa bersekolah di SMP Negeri karena jarak rumah dan sekolah yang terlalu jauh.

2. Efisiensi

Kriteria efisiensi mengacu pada upaya yang dilakukan untuk dapat mencapai tujuan utama sistem zonasi. Bentuk usaha yang dilakukan berupa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada walimurid dan pelayan terhadap masyarakat. Kriteria efisiensi sumber daya manusia seperti sekolah berusaha menciptakan posko PPDB untuk membantu memberikan layanan informasi kepada masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang bingung dengan sistem PPDB. Sedangkan fasilitas yang digunakan untuk menunjang proses PPDB, pihak sekolah menyediakan komputer untuk membantu masyarakat mendaftar di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka telah berhasil melaksanakan PPDB dengan hasil yang baik jika dinilai berdasarkan upaya sekolah dalam memperhatikan sarana prasarana yang diperlukan agar sistem PPDB dapat berjalan dengan lancar di kota Surabaya.

3. Kecukupan

Kecukupan pada kebijakan berarti tujuan yang dicapai dianggap tepat dalam berbagai keadaan, namun penilaian tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Untungnya bagi siswa yang tinggal di dekat sekolah negeri, masuk ke sekolah negeri masih mudah, meski dengan nilai ujian yang relatif rendah. Bagi siswa yang rumahnya terlalu jauh dari sekolah, sungguh disayangkan. Namun pada tingkat SMPN di Surabaya masih terdapat sistem zonasi jalur khusus bagi murid yang mempunyai prestasi akademik baik.

4. Perataan

Perataan yang dimaksud dalam kriteria ini adalah keadilan dan kesetaraan dalam pelaksanaan program sistem zonasi di seluruh SMP Negeri di Surabaya. Berdasarkan penelitian dan observasi yang dilakukan, klasifikasi yang dimaksud adalah pemerataan kualitas layanan sekolah tanpa membedakan sekolah favorit dan tidak favorit. Terkait infrastruktur, penilaian masih belum lengkap atau belum merata. Hasil penelitian, sekolah yang menduduki peringkat favorit memiliki sarana prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, dibandingkan dengan sekolah yang tidak menduduki peringkat favorit, sarana prasarananya kurang memadai.

5. Responsivitas

Keberhasilan suatu kebijakan juga diukur dari respon masyarakat. Dalam hal ini terdapat reaksi positif dan negatif yang didapat dari masyarakat khususnya orang tua pasca diterapkannya kebijakan sistem zonasi. Respon positif orang tua terhadap sistem zonasi adalah mereka tidak perlu khawatir sekolah mana yang lebih baik karena semuanya seimbang. Namun, ada juga respon negatif dari para orang tua yang kecewa karena nama anaknya dihapus dari sekolah negeri karena pembatasan jarak. Berdasarkan data yang diperoleh, salah satu orang tua mengaku kecewa nama anaknya tergeser oleh sekolah negeri tempat ia bersekolah. Hal ini dapat menyebabkan anak kehilangan minat belajar karena mereka yakin usahanya akan sia-sia jika rumahnya jauh dari sekolah umum.

6. Ketepatan

Ketepatan menunjukkan bahwa pilihan kebijakan yang digunakan dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem zonasi PPDB tingkat SMP Negeri di Surabaya mempunyai nilai yang baik bagi sekolah karena banyak masyarakat yang berminat. Bagi orang tua, bedanya kebijakan PPDB mempunyai dampak negatif dan positif. Pembagian siswa ke setiap sekolah dengan alokasi yang merata kini menciptakan pemerataan pelayanan pendidikan yang tidak lagi terpusat pada beberapa sekolah saja.

Hasil PPDB sistem zonasi tingkat SMPN Secara keseluruhan telah mencapai target. Mengingat dampak positifnya, sistem zonasi ini dapat menekan biaya transportasi. Selain itu, siswa tidak perlu membuang waktu untuk berangkat ke sekolah dan istirahat yang cukup. Kualitas pendidikan di Indonesia perlu pemerataan mutu secara merata agar siswa dapat memperoleh pendidikan yang sama.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kebijakan sistem zonasi PPDB tingkat SMP Negeri di Kota Surabaya menurut teori William N Dunn, 2003. Kebijakan sistem zonasi PPDB di sekolah SMPN di Kota Surabaya mematuhi ketentuan peraturan dikeluarkan pemerintah dalam Perwali Surabaya No. 21 Tahun 2024 tentang PPDB yang salah satunya menggunakan sistem zonasi. Tujuan penerapan sistem zonasi ini tidak lain hanyalah pemerataan pendidikan yang berkualitas, tentunya sesuai dengan harapan pemerintah.

Berdasarkan penafsiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi pada kebijakan Sistem Zonasi PPDB tingkat SMPN di Kota Surabaya dapat dilaksanakan sudah

baik, walaupun masih ada beberapa yang perlu dibenahi dan ditingkatkan agar hasilnya benar-benar sesuai dengan tujuan PPDB.

Saran

Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti ingin memberikan saran agar kebijakan zonasi PPDB tingkat SMP Negeri di Surabaya dapat lebih maksimal kedepannya, karena hal ini dilakukan pemerintah untuk mencari dan mengkaji peluang mengenai permasalahan yang dihadapi peserta didik baru pada saat proses pendaftaran. Pemerintah juga harus melihat langsung apakah sosialisasi dilakukan secara merata agar penerapan sistem zonasi PPDB bisa terlaksana secara maksimal.

DAFTAR REFERENSI

Dunn, W. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik.

Karmila, M., Syakira, N., & Mahir, M. (2020). Analisis kebijakan pendidikan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. *Jurnal Mappesona*, 2(1), 1–14. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/mappesona/article/download/827/559>

Kemendikbud. (2020). Penerimaan Peserta Didik Berdasarkan Zonasi Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain yang Sederajat, Pub. L. No. 17 (2017). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/138482/permendikbud-no-17-tahun-2017>

Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri., Pub. L. No. 21 (2024). <https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4462#:~:text=Peraturan%20Walikota%20Nomor%2021%20Tahun,dan%20Sekolah%20Menengah%20Pertama%20Negeri.>

RedaksiKBID. (n.d.). Tak bisa masuk SMPN karena PPDB pakai sistem zonasi, warga Wonorejo desak Pemkot bangun sekolah baru. *KAMPUNGBERITA*. <http://kampunghberita.id/tak-bisa-masuk-smpn-karena-ppdb-pakai-sistem-zonasi-warga-wonorejo-desak-pemkot-bangun-sekolah-baru/>

Setiawan, H. R., & Rahaju, T. (2021). Evaluasi sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP di Kota Surabaya. *Publika*, 9(4), 491–502. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n4.p491-502>

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif.

Widyastuti, R. T. (2020). Dampak pemberlakuan sistem zonasi terhadap mutu sekolah dan peserta didik. *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi*, 7(1), 11–19.
<https://doi.org/10.47668/edusaintek.v7i1.46>

Wirahadi, U. (n.d.). PPDB SMP di Surabaya banyak keluhan karena sosialisasi tak maksimal, wali murid minta dua zonasi dihapus. *JawaPos.Com*.
<https://www.jawapos.com/surabaya-raya/011355090/ppdb-smp-di-surabaya-banyak-keluhan-karena-sosialisasi-tak-maksimal-wali-murid-minta-dua-zonasi-dihapus?page=1>